

Jokowi soal Lukas Enembe Ditangkap: Semua Orang Sama di Mata Hukum

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara soal penangkapan yang dilakukan penyidik KPK terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe, tersangka suap. Kepala Negara menegaskan penegakan bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang.

"Ya semua sama di mata hukum. Itu kan proses penegakan hukum yang harus kita hormati," kata Jokowi usai menghadiri HUT ke-50 PDIP di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/1).

Jokowi tidak berkomentar banyak perihal penangkapan Lukas Enembe. Dia meyakini KPK pasti telah mengantongi bukti kuat hingga menetapkan seseorang menjadi tersangka.

"Dan saya kira KPK menangkap pasti sudah punya fakta barang bukti yang ada, itu pasti," jelas Jokowi.

KPK menangkap Lukas Enembe, meski sebelumnya selalu menarasikan dirinya dalam keadaan sakit.

"Kami sudah melakukan pemanggilan sebelumnya secara patut dan sah, tetapi kemudian kami juga memiliki penilaian terhadap tersangka ini," ucap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan

Persada, Jakarta Selatan, Selasa (10/1).

"Sekalipun penasihat hukumnya telah menyampaikan terkait dengan keadaan tersangka ini, misalnya dengan narasi sakit dan bahkan kemudian berkirir surat tentang kesehatan Tersangka LE (Lukas Enembe) ini, tapi kami tidak serta-merta percaya begitu saja untuk Tersangka LE segera berobat ke Singapura," imbuhnya.

Tim hukum dan advokasi Gubernur Papua (THAGP) membenarkan Lukas Enembe sudah dibawa penyidik KPK dari Jayapura ke Jakarta pukul 14.00 WIT.

Anggota tim hukum, Roy Rening, mengatakan Lukas Enembe diterbangkan dari Bandara Sentani.

"Kami sudah mendatangi Mako Brimob dan begitu dapat keterangan dari Mako Brimob bahwa Pak Lukas sudah ke Bandara Sentani, maka kami langsung berangkat ke bandara. Namun, sesampainya di sana, Pak Lukas sudah diterbangkan dengan pesawat Trigana ke Jakarta," kata Roy.

"Kami minta kesehatan Pak Gubernur juga dipertimbangkan oleh KPK," ujar anggota THAGP, Petrus Bala Pattyona. ● han

Vonis Rendah Pemerksa di Lahat, Diduga Ada Penyelewengan Jaksa

JAKARTA (IM) - Hasil eksaminasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan dugaan penyimpangan yang dilakukan jaksa dalam kasus emerkosaan siswi SMA di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan (Sumsel). Hakim menjatuhkan vonis hanya 10 bulan penjara, lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang hanya menuntut 7 bulan penjara.

"Ditemukan bahwa Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara dan pejabat struktural di Kejaksaan Negeri Lahat tidak melakukan penelitian terhadap kelengkapan syarat formil dan kelengkapan syarat materil," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Senin (9/1) malam.

"Serta ditemukan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang," katanya menambahkan.

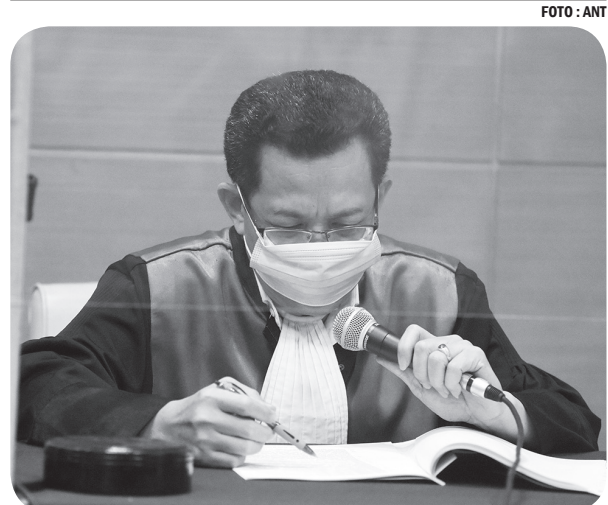
Sayangnya Ketut tidak menjelaskan lebih lanjut bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang

yang dilakukan JPU. Adapun hasil eksaminasi diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pemeriksa Fungsional dan sebagai tindak lanjut.

Selain itu, hasil eksaminasi juga telah menonaktifkan sementara JPU dan pejabat struktural terkait dalam kasus tersebut. Penonaktifkan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk mempermudah pemeriksaan kepada yang bersangkutan.

Diberitakan sebelumnya, OH (17) dan MAP (17) yang merupakan terdakwa emerkosaan siswi SMA di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, berinisial A (17) dijatuhi vonis 10 bulan penjara. Sedangkan sebelumnya, JPU Kejari Lahat hanya menuntut 7 bulan.

Putusan yang dibacakan majelis hakim pada Selasa (3/1), membuat keluarga korban histeris lantaran kecewa dengan putusan hakim lantaran kedua pelaku hanya divonis 10 bulan penjara. ● mei



GUGATAN PRAPERADILAN HAKIM AGUNG NONAKTIF GAZALBA SALEH DITOLAK

Hakim tunggal Haryadi membacakan amar putusan sidang gugatan praperadilan Hakim Agung nonaktif Mahkamah Agung (MA) Gazalba Saleh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (10/1). Dalam sidang tersebut hakim tunggal Haryadi menyatakan tidak menerima gugatan praperadilan Gazalba Saleh atas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara pidana Koperasi Simpan Pinjam Intidana yang bergulir di MA.

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



RAPAT PARIPURNA PEMBUKAAN MASA SIDANG

Sejumlah anggota DPR berswafoto usai mengikuti Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1). Rapat Paripurna tersebut menjadi pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023.

KPK Ngaku Tidak Ada Kendala Cari Harun Masiku, Tapi Kok Belum Ditangkap?

KPK sudah mendeteksi Harun Masiku di luar negeri. KPK pun mengaku tak ada kendala dalam pencariannya, tapi tersangka kasus suap itu belum juga ditangkap.

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tidak ada kendala apapun dalam pencarian buronan Harun Masiku. Tapi kok keberadaan tersangka kasus suap itu, belum ditangkap KPK?

Sebagai informasi, Harun Masiku sudah buron hampir tiga tahun. Hingga kini belum diketahui keberadaannya.

"Saya kira tidak ada kendala. Yang jelas bahwa proses proses-pencarian DPO yang itu adalah manusia kan, itu kan sesuatu yang tidak kemudian statis, diam, seperti mencari tempat. Kalau dia diam ditempat, gampang, dia kan di situ terus rumah, kan begitu. Ini kan orang," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (10/1).

Ali menekankan bahwa KPK memang mempunyai kewajiban untuk menangkap lima buronan tersangka kasus korupsi. Salah satunya, Harun Masiku. Saat ini, KPK masih berupaya mengejar politikus PDIP itu maupun buronan lainnya.

Kabar terakhir, Harun Masiku terdeteksi berada di luar negeri. Ali masih enggan membeberkan secara spesifik terkait perkembangan pencarian Harun Masiku. Sebab, hal itu bisa menggagalkan upaya serta strategi KPK dalam menangkap para buronan.

"Kalau secara teknis keberadaannya, tidak bisa kami sampaikan karena ini kan masih dalam pencarian strate-

ginya kan ada kalau udah kami sampaikan di forum atau kesempatan seperti ini ya sama aja kami kemudian menggagalkan tugas kami sendiri kan," ungkapnya.

Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif (caleg) asal PDI Perjuangan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemulsaan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR.

Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya. Ketiganya yakni, mantan Komisiner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan; mantan Anggota Badan Pengawas

Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina; serta pihak swasta, Saeful.

Harun Masiku sendiri berhasil lolos dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Dia berhasil melarikan diri saat tim KPK hendak menangkapnya. Dia kemudian ditetapkan sebagai buronan KPK pada Januari 2020. Harun juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

Bahkan, Harun telah ditetapkan sebagai buronan internasional. KPK telah meminta Interpol untuk menerbitkan red notice atasnama Harun Masiku. Kendati demikian, hingga kini belum diketahui keberadaan Harun Masiku. ● han

Koalisi NasDem-Demokrat-PKS Tak Kunjung Dideklarasikan, Ada Apa?

JAKARTA (IM) - Koalisi "Koalisi Perubahan" Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah lama digadang-gadang, tak kunjung direalisasikan. Apa penyebabnya? Direktur Eksekutif Charta Politik Yunarto Wijaya menilai, ada sejumlah faktor yang menyebabkan koalisi ketiga partai tersebut tak kunjung direalisasikan. Diduga salah satu karena mereka masih mengamati manuver PDI Perjuangan untuk Pemilu 2024.

"Menurut saya, mereka juga sekaligus ingin membaca peta dan keputusan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan," kata Yunarto kepada wartawan, Minggu (8/1).

Seperti diketahui bahwa partai politik yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu merupakan satu-satunya parpol yang lolos *presidential threshold* atau ambang batas pencalonan presiden tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain.

Menurut Yunarto, wajar jika calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) serta koalisi partai banteng sangat dinantikan oleh parpol-parpol lain. Bahkan

bukan tidak mungkin koalisi-koalisi yang telah terbentuk bubar jalan dan masing-masing parpol bermanuver ketika PDI-P sudah menentukan langkah.

"Itu akan mengubah segala konstelasi," ujar Yunarto.

Yunarto juga menduga, lamanya peresmian koalisi Nasdem-Demokrat-PKS tak lepas dari alotnya negosiasi sosok cawapres yang bakal mendampingi Anies Baswedan, bakal calon presiden yang sudah diumumkan Parta NasDem.

Seperti diketahui bahwa Partai Demokrat bersikukuh mengajukan nama ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjadi calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 mendatang.

Sementara, PKS bersikukuh mengusung mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS saat ini, Ahmad Heryawan atau Aher, untuk mendampingi Anies sebagai cawapres.

Soal calon wakil presiden, Yunarto melihat Partai Demokrat lebih ngotot memajukan AHY dibandingkan dengan PKS mengajukan nama

Aher Seandainya keinginan Demokrat tak terakomodasi, bukan tidak mungkin partai berlabang bintang mercy itu henggang dari rencana koalisi.

"Kita tahu karakter dari Partai Demokrat yang sangat terpusat pada nama Yudhoyono sepertinya memang harga mati ada di nama AHY yang menurut saya memang akan menjadi variabel penentu," ujarnya.

Seandainya AHY yang jadi cawapres Anies, Demokrat diprediksi mendulang limpahan elektoral besar. Sebaliknya, NasDem dan PKS bakal rugi. Sementara, jika Aher maju ke panggung pemilihan, hanya PKS yang diuntungkan, sedangkan Nasdem dan Demokrat tak terdampak efek ekor jas. Demi limpahan elektoral inilah, kata Yunarto, partai politik kekeh ingin memajukan kader mereka sebagai calon RI-2.

"Dua partai yang lain yang belum bisa meng-state Anies selama beberapa bulan ini kan paling tidak ingin mendapatkan jatah cawapres sehingga kemudian efek ekor jas bisa didapatkan oleh partainya," tutur Yunarto. ● han

Bawaslu Minta KPU Serious Tetapkan Lokasi Khusus Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) serius dalam menetapkan lokasi khusus Pemilu 2024. Sebab banyak potensi lokasi khusus yang belum disosialisasi atau diusulkan menjadi lokasi khusus.

Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, mengatakan, Bawaslu mengidentifikasi ada 3.189 potensi lokasi khusus pada 37 provinsi di Indonesia.

"Berdasarkan ketentuan pasal 179 PKPU Nomor 7 Tahun 2022, pemilih di lokasi khusus merupakan pemilih berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sehingga KPU melalui KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar pemilih di lokasi khusus," kata Lolly dalam keterangannya, Selasa (10/1).

Dari 3.189 potensi lokasi khusus, Lolly mengatakan lokasi terbanyak berada di kawasan pendidikan dan pesantren sebanyak 1.486 lokasi. Kemudian, diusulkan oleh kawasan pertambangan, perkebunan dan perusahaan sebanyak 548 lokasi.

Selanjutnya, kawasan rumah sakit, klinik, Puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan lainnya sebanyak 494 lokasi. Panti Sosial sebanyak 421 lokasi dan lembaga

pemasyarakatan sebanyak 170 lokasi.

Namun, dari 3.189 lokasi yang berpotensi itu, hanya sebagian kecil lokasi yang telah diusulkan jadi lokasi khusus oleh KPU.

"Dari data itu, sebanyak 358 lokasi sudah dilakukan sosialisasi oleh KPU, namun belum diusulkan menjadi lokasi khusus. Sebanyak 377 lokasi bersedia diusulkan sebagai lokasi khusus namun belum dilakukan sosialisasi oleh KPU, sedangkan sebanyak 2.454 potensi lokasi khusus belum dilakukan sosialisasi, dan belum diusulkan menjadi lokasi khusus," kata Lolly.

Berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu itu, Bawaslu menyebut penentuan lokasi khusus yang dihasilkan oleh KPU belum sempurna. Sehingga Bawaslu perlu mendorong KPU agar serius menentukan lokasi khusus tersebut.

Lolly juga meminta KPU dalam menentukan lokasi khusus menjadi perhatian serius dalam proses pencocokan dan penelitian (cocklit).

"Proses pemutakhiran daftar pemilih sebagai wujud jaminan hak pilih setiap individu dilakukan secara maksimal termasuk kepada pemilih yang tidak menetap di rumah," ucapnya. ● mei

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Ketok Palu RAPBD Jambi 2017

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Penetapan tersangka baru itu merupakan hasil pengembangan kasus suap mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola.

"Berdasarkan analisis fakta persidangan, KPK menemukan kecukupan alat bukti sehingga kembali kembangkan perkara dugaan korupsi suap ketok palu DPRD Jambi tahun 2017 dan 2018. KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (10/1).

Sejalan dengan itu, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap 10 anggota DPRD Jambi periode 2014 - 2019, hari ini. Berdasarkan informasi yang diterima dari

KPK, saat ini baru enam mantan anggota DPRD Jambi yang memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka.

"Info yang kami peroleh telah hadir enam orang tersangka dan segera dilakukan pemeriksaan. Perkembangan akan disampaikan," ujarnya.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan puluhan orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Salah satu tersangka perdana dalam perkara ini yaitu, mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola.

Selain Zumi Zola, KPK juga menetapkan para pejabat pada Pemprov Jambi lainnya sebagai tersangka dalam perkara ini. Bahkan, anggota DPRD Jambi juga sudah banyak yang dijerat dalam perkara ini. Mayoritas para tersangka sudah diputus bersalah oleh pengadilan. ● mei



REALISASI CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM PENDIDIKAN TAHUN 2022 Seorang guru menyampaikan materi pada kegiatan belajar mengajar di SMPN 8 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (10/1). Kementerian Keuangan (Kemenku) melaporkan anggaran program pendidikan untuk tahun 2022 terealisasi mencapai sebanyak Rp476,6 triliun yang dilakukan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp171,5 triliun, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp281 triliun dan pembiayaan basiswa serta proyek riset sebesar Rp20 triliun.

mandiri
PENAWARAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE)

Bahwa dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan penjualan atau pengalihan piutang (Cessie) terhadap debitur sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat Kantor	Jumlah Tagihan Per Tgl 10 Januari 2023	Alamat Agunan
1.	PT. Wanodia Sejati Utama	Jl. PLTD No. 1 PLN, Senayan, Jakarta Selatan	312,166,355.00	Jalan Kramat Pulo 9.C, Senin, Jakarta Pusat

Apabila ada yang berminat dalam pengalihan kredit debitur di atas dapat menyampaikan penawaran secara tertulis ke alamat dibawah ini paling lambat tanggal 14 Januari 2023, jam 10.00 WIB.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Retail Collection & Recovery Group
Regional Retail Collection & Recovery Region V
Wisma Mandiri II Lt.17
Jl. Kebon Sirih No.83, Jakarta 10340.
Telp. 30023002 Ext. 7224397, 7129421

Demikian untuk diketahui semua pihak.

Jakarta, 11 Januari 2023
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
Regional Retail Collection & Recovery Region V / Jakarta 3